BAB II
KAJIAN LITERATUR

2.1. Teori *Stakeholder (Stakeholder Theory)*

Teori *stakeholder* menjadi salah satu teori yang digunakan dalam etika bisnis. Teori ini diperkenalkan oleh R. Edward Freeman dalam karyanya *"Strategic Management: A Stakeholder Approach"* pada tahun 1984 dan berpendapat tentang perusahaan harus mementingkan kepentingan lain selain keuntungan dan pemegang saham (*wealth maximization*) (Saputri dkk., 2024). Kepentingan lain ini bisa meningkatkan nilai perusahaan berupa pengelolaan karyawan, pemasok, pemerintah, pelanggan, dan pemegang saham (*stakeholder welfare maximization*) (Rezaee, 2016). Salah satu contoh penerapan teori dilakukan oleh PT Merck bahwa perusahaan tersebut berhasil membantu orang-orang yang tinggal di daerah terpencil dengan biaya yang besar dan waktu yang lama sehingga menumbuhkan reputasi PT Merck hingga saat ini (Velasquez, 2013). Jika dilihat dari contoh PT Merck tersebut, pemegang saham belum tentu menyetujui terhadap risiko yang besar untuk menjalankan keputusan tersebut. Meskipun begitu, teori ini menyampaikan bahwa aktivitas keberlanjutan ini. Ini merupakan suatu investasi jangka panjang. Peran teori *stakeholder* harus seimbang dengan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik CSR (Palupi dkk., 2024).

Dalam konteks Indonesia, di mana praktik pengungkapan keberlanjutan sebagian besar masih bersifat sukarela, tekanan dari pemangku kepentingan menjadi mekanisme penggerak yang signifikan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan. Berbagai kepentingan pemangku kepentingan dijaga oleh beberapa perwakilan perusahaan, yaitu dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit melalui implementasi dari aktivitas ESG, pengecekan, dan pengambilan keputusan. Hal ini mengakibatkan kualitas pengungkapan keberlanjutan berhubungan langsung dengan teori *stakeholder*. Dalam konteks penelitian ini, tata kelola perusahaan menjadi mekanisme internal yang memastikan bahwa kepentingan pemangku kepentingan diakomodasi melalui penyusunan laporan keberlanjutan

yang relevan dan kredibel. Oleh karena itu, struktur dewan dan komite pengawasan menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas pengungkapan keberlanjutan.

Pada pembaruan GRI 2021, definisi pemangku kepentingan menjadi lebih fokus pada dampak: pemangku kepentingan kini didefinisikan sebagai "individu atau kelompok dengan kepentingan yang terpengaruh atau dapat terpengaruh oleh aktivitas organisasi" (GRI, 2021). Revisi definisi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang berfokus pada pengaruh pemangku kepentingan terhadap perusahaan (*outside-in perspective*) menuju pendekatan yang juga mempertimbangkan dampak perusahaan terhadap pemangku kepentingan (*inside-out perspective*). Pendekatan ganda ini dikenal sebagai *double materiality* yang kini menjadi landasan dalam *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) (Vola dkk., 2025).

2.2. *Ecofeminism Theory*

Ecofeminism dipahami sebagai pandangan yang menyatakan bahwa terdapat hubungan historis, pengalaman sosial, simbolis, dan teoritis antara peran perempuan terhadap alam (Velasquez, 2013). Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan tersebut dianggap penting dalam perspektif relasional maupun etika lingkungan. *Ecofeminism* juga banyak digunakan dalam penelitian yang membahas isu gender, lingkungan, dan keberlanjutan. Salah satu pakar filsafat yang menggunakan pendekatan *ecofeminism* adalah Alicia Puleo, yang menghubungkan *ecofeminism* dengan etika lingkungan serta menekankan relevansi *ecofeminism* dalam diskursus perubahan iklim (Puleo, 2017). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan perempuan memiliki kaitan dengan upaya perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Beberapa pandangan dalam *ecofeminism* dinilai terlalu menekankan perempuan dan kedekatannya dengan alam sehingga memperkuat stereotip bahwa perempuan bersifat lebih peduli, mengasuh, dan dekat dengan lingkungan (Priyadarshini, 2025). Menurut Alicia Puleo, peran perempuan tidak secara biologis memiliki karakteristik tersebut. Namun, teori ini dilihat dari pengalaman sosial dan

proses sosialisasi untuk menjalankan peran yang berkaitan dengan kepedulian, seperti merawat anak, lansia, atau anggota keluarga lainnya dari perspektif konstruktivisme gender (Puleo, 2017). Selain itu, pendekatan *ecofeminism* juga dikritik karena terlalu menonjolkan aspek spiritualitas dan simbolisme yang dianggap belum cukup untuk mengatasi ketidakadilan gender dan kerusakan lingkungan yang bersifat sistematis. Meskipun demikian, gerakan lingkungan yang dipimpin perempuan, seperti *Green Belt Movement* yang dipelopori oleh Wangari Maathai di Kenya, menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan ekologi dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain itu, terdapat pula *Chipko Movement* di India yang dipimpin oleh perempuan pedesaan untuk mencegah penebangan hutan, serta gerakan yang dipelopori oleh Vandana Shiva melalui Navdanya yang mendukung pertanian berkelanjutan dan perlindungan sumber daya alam. Berbagai gerakan tersebut menunjukkan kontribusi perempuan dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dalam konteks perusahaan energi, pendekatan tersebut mendorong pengelolaan lingkungan yang tidak hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya, tetapi juga pada keberlanjutan dan pemeliharaan hubungan dengan lingkungan hidup. Talwar (2024) menambahkan bahwa perempuan memiliki kontribusi nyata dalam menjaga keberlanjutan melalui pengetahuan ekologis lokal, pengelolaan sumber daya komunitas, serta kemampuan melakukan pemantauan terhadap dampak lingkungan dan kesehatan akibat aktivitas industri ekstraktif. Selain itu, Helman (2023) menjelaskan bahwa perempuan memiliki pendekatan berbasis kepedulian (*care-based approach*) yang menekankan observasi terhadap kebutuhan lingkungan secara kontekstual dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut dapat mendukung proses pemulihan lingkungan, pengelolaan sumber daya, dan pengambilan keputusan keberlanjutan yang lebih responsif terhadap dampak sosial maupun ekologis. Dengan demikian, keberadaan perempuan dalam *governance* keberlanjutan perusahaan energi dapat memperkuat perhatian perusahaan terhadap praktik keberlanjutan, pengelolaan risiko lingkungan, serta kualitas pengungkapan keberlanjutan secara lebih komprehensif dan bertanggung jawab.

2.3. Kualitas Pengungkapan Keberlanjutan

Pengungkapan keberlanjutan adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengomunikasikan aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada pemangku kepentingan (Ardiana, 2023). Pengertian pengungkapan keberlanjutan tersebut juga sesuai dengan standar yang digunakan dalam menyusunnya, yaitu GRI. Nilai *wealth maximization* yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan teknologi dalam perusahaan dapat mendorong kerusakan lingkungan untuk profitabilitas dan tidak mempertimbangkan efek sosial (Ganesan dkk., 2017). Oleh karena itu, perilaku perusahaan yang etis sebagai kontributor dalam menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan menjadikan praktik keberlanjutan ini sebagai salah satu nilai perusahaan.

GRI (2013) juga mencantumkan bahwa laporan keberlanjutan berisi informasi kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan informasi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terstruktur dan akurat. Pentingnya pengungkapan keberlanjutan adalah kesuksesan jangka panjang dan dapat meningkatkan nilai perusahaan di pasar (UNGC, 2014). Investor menggunakan laporan keberlanjutan sebagai salah satu pertimbangan sebelum memiliki saham tersebut sehingga informasi yang ditulis dalam laporan keberlanjutan haruslah valid. Pengungkapan keberlanjutan yang berkualitas adalah laporan yang bebas dari bias, akurat, jujur, dan andal (Erin dkk., 2022). Menurut Habek & Wolniak (2016) pengungkapan berkelanjutan yang berkualitas memiliki dua kriteria, yaitu relevansi dan kredibilitas dari informasi yang diberikan dalam laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan juga membutuhkan *assurance* untuk menjamin keandalan dan kredibilitas informasi (Simnett dkk., 2009).

2.4. Komisaris Perempuan

Peran dari dewan komisaris dengan gender perempuan dalam pengungkapan berkelanjutan penting untuk dibahas karena pengambilan keputusan

membutuhkan pandangan dari non finansial juga. Pengambilan keputusan dari segi non finansial lebih didominasi oleh dewan komisaris perwakilan perspektif relasional sehingga dapat menghasilkan laporan keberlanjutan yang lebih berkualitas (Harjoto dkk., 2015). Komisaris perempuan dapat menyeimbangkan keputusan dan perempuan bisa menjadi pendukung dalam strategi keberlanjutan (Bakar dkk., 2019). Temuan ini dapat dijelaskan oleh kecenderungan perempuan untuk memiliki orientasi yang lebih tinggi terhadap aspek etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kualitas pengungkapan keberlanjutan perusahaan (Eberhardt-Toth, 2017). Alicia Puleo secara eksplisit menyatakan bahwa perempuan tidak secara alamiah atau biologis lebih dekat dengan alam. Ia menjelaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan lebih banyak terbentuk melalui proses sosial dan pengalaman historis perempuan dalam peran merawat (*caregiving roles*).

2.5. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Berdasarkan POJK 51 Pasal 2, prinsip tata kelola merupakan salah satu pelaksanaan yang diwajibkan terjadi dalam penerapan keberlanjutannya agar dapat mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam strategi bisnis. Penyusunan rencana aksi keuangan keberlanjutan serta implementasi yang dilakukan oleh dewan direksi dan disetujui oleh dewan komisaris wajib disampaikan setiap tahun kepada OJK.

2.5.1. Komisaris Independen

Untuk pemantauan yang andal, dewan komisaris membutuhkan orang yang ditunjuk khusus untuk pemantauan dan terlepas dari hubungan dalam perusahaan atau disebut independen (Tulay, 2016). Orang yang ditunjuk disebut sebagai komisaris independen. Komisaris independen akan melindungi profesionalisme dan reputasi untuk menjaga kepemimpinan di pasar (Ganesan, 2017). Tujuan utama adanya komisaris independen adalah memastikan bahwa pengelolaan perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, dan kewajaran (Alfara

& Kuntadi, 2024). Dengan adanya lebih banyak anggota komisaris independen, kemungkinan perusahaan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan menjadi lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh komisaris independen cenderung memilih untuk melindungi kepentingan pemegang saham.

2.5.2. Komite Audit

Komite audit berfokus pada tiga hal, yaitu manajemen risiko, pengendalian, tata kelola, dan pelaporan keuangan. Seiring dengan kebutuhan pemegang saham yang meningkat, komite audit tidak hanya memeriksa pelaporan dan pengungkapan dari laporan keuangan. Namun, akuntabilitas dalam laporan keberlanjutan juga menjadi tanggung jawab komite audit. Komite audit memastikan setiap informasi dalam pengungkapan keberlanjutan yang disebar ke publik berdasarkan data yang akurat (Tumwebaze dkk., 2022).

Selain itu, komite audit berperan menjadi penghubung di antara dewan direksi dan auditor eksternal. Jika tanpa kesepakatan di antara dewan direksi atau manajemen dengan auditor eksternal, maka komite audit yang memberikan opini independen sebagai penengah dari kedua pihak tersebut. Perusahaan mengadakan pertemuan dengan auditor eksternal perusahaan untuk membahas masalah akuntansi, audit, pengendalian internal, dan pelaporan keuangan (Agyei-Mensah, 2019). Dengan adanya peran dari komite audit, perusahaan dapat lebih meningkatkan akuntabilitas atas laporan keberlanjutannya.

2.5.3. Frekuensi Rapat Komite Audit

Frekuensi rapat komite audit mencerminkan tingkat ketekunan (*diligence*) dan efektivitas komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan, karena komite audit yang lebih sering mengadakan rapat cenderung lebih aktif dalam memonitor proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan aktivitas manajemen (Al-Nohood dkk., 2024). Peraturan dan kode tata kelola juga umumnya menetapkan jumlah minimum rapat komite audit karena frekuensi rapat yang tinggi dianggap diperlukan untuk menjalankan tanggung jawab pengawasan secara efektif. Berdasarkan POJK Nomor 55 Tahun 2015, rapat komite audit wajib dilaksanakan

paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan atau sekurang-kurangnya 4 kali dalam 1 tahun. Berbagai penelitian empiris dan meta-analisis menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit yang lebih tinggi berkaitan dengan penurunan praktik *earnings management*, berkurangnya *restatement* laporan keuangan, peningkatan kualitas pelaporan, ketepatan waktu audit, serta respons pasar yang lebih baik, sehingga frekuensi rapat komite audit dipandang sebagai salah satu indikator penting efektivitas komite audit (Syofyan dkk., 2021).

2.6. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Farida (2019)	Pengaruh Diversitas Gender Terhadap Pengungkapan *Sustainability Development Goals*	1. Variabel independen: keberadaan dewan direksi perempuan dan keberadaan dewan komisaris perempuan 2. Variabel dependen: pelaporan *sustainability development goals* (SDGs)	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 2. Keberadaan perempuan dalam dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap

				pengungkapan SDGs. 3. Dari variabel kontrol yang digunakan, hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap pengungkapan SDGs, sedangkan variabel profitabilitas dan *leverage* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.
2	Diono & Prabowo (2017)	Analisis Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Profitalbilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan *Sustainability Report*	1. Variabel independen: ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, komposisi dewan komisaris perempuan, profitabilitas, ukuran perusahaan 2. Variabel dependen: tingkat pengungkapan *sustainability report*	1. Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, keberadaan perempuan dalam dewan komisaris, dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan.

				2. Namun, hasil pengujian terhadap ukuran perusahaan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan.
3	Trianaputri & Djakman (2019)	*Quality of Sustainability Disclosure among the* ASEAN-5 *Countries*	1. Variabel independen: kelompok pemangku kepentingan internal, kelompok pemangku kepentingan eksternal, media massa, hasil audit big 4, dan kekuatan regulasi 2. Variabel dependen: Kualitas pengungkapan keberlanjutan	1. Kualitas pengungkapan keberlanjutan perusahaan di ASEAN-5 masih relatif rendah hingga menengah, meskipun jumlah perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan terus meningkat. 2. Sebagian besar perusahaan telah mengadopsi standar GRI, namun penerapannya masih bersifat simbolik, sehingga kualitas

				pengungkapan belum mencerminkan transparansi yang substantif. 3. Perbedaan kualitas pengungkapan antar negara dipengaruhi oleh kekuatan regulasi dan tata kelola, yang menegaskan pentingnya peran mekanisme *governance* dalam meningkatkan kualitas pengungkapan keberlanjutan.
4	Listiani & Fadjar (2025)	*The Influence of Good Corporate Governance and Profitability on Sustainability Report Disclosure with Firm Size as A Moderating Variable (A Study Case on Banking Sector in* Indonesia 2018-2023)	1. Variabel independen: komisaris independen, komite audit, profitabilitas. 2. Variabel moderasi: ukuran perusahaan. 3. Variabel dependen: pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report disclosure*).	1. Komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. 2. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

				3. Ukuran perusahaan terbukti memoderasi pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Namun, tidak memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.
5	Razamah & Simatupang (2026)	*Determinants of Sustainability Reporting: Profitability, Board of Directors, Audit Committee, and Firm Size in* SRI-KEHATI	1. Variabel independen: profitabilitas, dewan direksi, komite audit. 2. Variabel moderasi: ukuran perusahaan. 3. Variabel dependen: pengungkapan keberlanjutan (*sustainability reporting disclosure*).	1. Komite audit, dewan direksi, dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan keberlanjutan. 2. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan memoderasi hubungan antara dewan direksi dan pengungkapan keberlanjutan serta

				hubungan antara profitabilitas dan pengungkapan keberlanjutan. 3. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara komite audit dan pengungkapan keberlanjutan. 4. Ukuran perusahaan terbukti berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi keberlanjutan perusahaan.

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Komisaris Perempuan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Malaysia, adanya kepemimpinan perempuan dalam suatu perusahaan meningkatkan kualitas informasi keberlanjutan (Bakar dkk., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa jika dewan komisaris diseimbangkan dengan pandangan dari perempuan dalam pengambilan keputusan dinilai positif terhadap luas dan kualitas pengungkapan keberlanjutan. Perempuan dikenal lebih paham terhadap informasi keberlanjutan dan mengetahui bagaimana memperlakukan sosial yang lebih baik (Al-Shaer & Zaman, 2016). Sensitivitas yang dimiliki oleh perempuan mendorong adanya ide baru. Selain itu, perempuan

juga memiliki perhatian yang lebih kepada pemangku kepentingan, seperti komunitas, karyawan, dan lingkungan (Bakar dkk., 2019).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari komisaris perempuan oleh penelitian Diono & Prabowo (2017) serta Farida (2019) yang menyatakan keberadaan perempuan pada dewan komisaris mampu meningkatkan kualitas pengawasan dan mendorong transparansi perusahaan dalam mengungkapkan informasi keberlanjutan. Keberadaan komisaris perempuan memberikan perspektif yang lebih beragam, khususnya terkait isu sosial dan lingkungan, serta meningkatkan sensitivitas dewan terhadap tuntutan pemangku kepentingan. Selain itu, komisaris perempuan cenderung lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan lebih memperhatikan risiko reputasi jangka panjang, sehingga mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan keberlanjutan. Berdasarkan perbedaan temuan empiris tersebut, penelitian ini menguji kembali pengaruh komisaris perempuan terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan perusahaan.

Berdasarkan laporan *Women in Business* 2025 yang disusun oleh Grant Thornton, proporsi keterlibatan perempuan di jabatan manajemen dan eksekutif mengalami penurunan. Indonesia memiliki proporsi sekitar 36,3% perempuan yang memegang jabatan penting dalam perusahaan dan proporsi tersebut menurun sekitar 1,1% dari tahun 2024. Seiring dengan tekanan eksternal yang menekankan kesetaraan gender, perempuan bisa mendapatkan posisi yang sama untuk saling melengkapi dalam pembentukan strategi dan pengawasan bisnis.

Berdasarkan teori *stakeholder*, keberagaman gender dalam dewan komisaris memperkaya perspektif pengawasan serta meningkatkan sensitivitas perusahaan terhadap kepentingan dan tuntutan pemangku kepentingan. Kehadiran perempuan dalam dewan komisaris mendorong perhatian yang lebih besar terhadap isu sosial dan lingkungan yang relevan bagi pemangku kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi komisaris perempuan, maka semakin besar dorongan perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan keberlanjutan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial dan lingkungan.

Berdasarkan teori *ecofeminism*, terdapat hubungan historis, pengalaman sosial, dan etika lingkungan antara perempuan dan upaya perlindungan lingkungan (Velasquez, 2013). Dalam perspektif *critical ecofeminism*, Puleo (2017) menegaskan bahwa kepedulian perempuan terhadap lingkungan bukan merupakan karakteristik biologis, melainkan terbentuk melalui proses sosialisasi dan pengalaman sosial yang mengembangkan nilai *ethics of care*, empati, serta tanggung jawab terhadap individu maupun lingkungan. Nilai-nilai tersebut berpotensi memengaruhi cara perempuan memandang isu keberlanjutan ketika terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Berbagai gerakan lingkungan yang dipimpin perempuan, seperti *Green Belt Movement* di Kenya dan *Chipko Movement* di India, menunjukkan kontribusi nyata perempuan dalam mendorong pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Talwar (2024) dan Helman (2023) menjelaskan bahwa perempuan memiliki kontribusi dalam pengelolaan sumber daya, pemantauan dampak lingkungan, serta pendekatan berbasis kepedulian (*care-based approach*) yang mendukung pengambilan keputusan keberlanjutan. Oleh karena itu, keberadaan perempuan dalam dewan komisaris dipandang mampu memperkuat perhatian perusahaan terhadap praktik keberlanjutan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong penyajian pengungkapan keberlanjutan yang lebih komprehensif dan berkualitas kepada para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

H1 = Komisaris Perempuan berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan

2.7.2. Komisaris Independen

Komisaris independen berperan dalam melindungi kepentingan pemegang saham serta mendorong peningkatan transparansi dan kualitas pengungkapan keberlanjutan (Jizi dkk., 2014). Peran tersebut dijalankan melalui fungsi pengawasan yang objektif dan independen dalam struktur tata kelola perusahaan. Keberadaan komisaris independen juga berkaitan dengan upaya menjaga profesionalisme dan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Selain itu,

sebagai pihak yang tidak terafiliasi dengan manajemen, komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara akuntabel dan berkelanjutan. Dengan demikian, komisaris independen dapat memberikan dorongan bagi perusahaan untuk menyusun dan mengungkapkan informasi keberlanjutan secara lebih komprehensif dan berkualitas.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sari & Hasnawati (2024) dalam Jurnal Ekonomi Trisakti menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan, khususnya pada dimensi keandalan (*reliability*). Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam dewan, semakin besar dorongan bagi perusahaan untuk menyajikan laporan keberlanjutan yang andal dan dapat dipercaya. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa keberadaan komisaris independen berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengungkapan keberlanjutan melalui peningkatan integritas dan kredibilitas informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan.

Selain itu, hipotesis ini sejalan dengan penelitian dari Listiani & Fadjar (2025) yang menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Komisaris independen sebagai pihak yang dianggap objektif dalam komposisi komisaris independen dapat membatasi perilaku *opportunistic* manajemen dan meningkatkan laporan keberlanjutan. Pedoman Umum GCG yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang menyatakan bahwa komisaris independen diharapkan tidak hanya mendorong perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Dalam kerangka teori *stakeholder*, perusahaan tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemegang saham, melainkan juga memiliki tanggung jawab terhadap berbagai pihak yang terdampak oleh aktivitasnya. Komisaris independen, karena posisinya yang tidak terafiliasi dengan manajemen maupun pemegang saham pengendali, memiliki peran yang lebih objektif dalam memastikan bahwa kepentingan para pemangku kepentingan turut dipertimbangkan dalam kebijakan

perusahaan. Melalui fungsi pengawasan tersebut, komisaris independen dapat mendorong perusahaan untuk menyajikan informasi sosial dan lingkungan secara lebih terbuka, sehingga pengungkapan keberlanjutan menjadi lebih berkualitas dan dapat dipercaya. Pernyataan-pernyataan tersebut membentuk hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2 = Komisaris independen berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan

2.7.3. Jumlah Anggota Komite Audit

Dalam proses peninjauan informasi non finansial, informasi keberlanjutan akan ditinjau, dan jika informasi tersebut tidak disertakan, komite audit dapat memberi rekomendasi kepada dewan. Fokus komite audit yang efektif telah bergeser dari mengawasi pelaporan keuangan tradisional ke menangani perkembangan yang muncul dalam pelaporan seperti pelaporan keberlanjutan dan terintegrasi. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa komite audit memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela (Samaha dkk., 2015). Selain itu, efektivitas komite audit memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kualitas pengungkapan sukarela perusahaan (Agyei-Mensah, 2019) dan berkontribusi signifikan terhadap akuntabilitas (Bananuka dkk., 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Meinawati & Wirakusuma (2023) menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas *sustainability report*, yang ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,025 dengan nilai signifikansi 0,016 (<0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar jumlah anggota komite audit, semakin meningkat pengawasan dan kualitas informasi keberlanjutan yang diungkapkan perusahaan. Banyaknya anggota komite audit memungkinkan adanya pertukaran pandangan dan evaluasi yang lebih komprehensif, sehingga laporan keberlanjutan yang disajikan menjadi lebih akurat dan berkualitas. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa komite audit berkontribusi secara positif terhadap peningkatan kualitas pengungkapan keberlanjutan. Berdasarkan landasan teoritis dan dukungan empiris tersebut, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H3 = Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan

2.7.4. Frekuensi Rapat Komite Audit

Berdasarkan perspektif teori *stakeholder*, komite audit yang tingkat ketekunan yang tinggi membantu memastikan bahwa perusahaan menyediakan informasi keberlanjutan yang transparan dan andal untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan terkait akuntabilitas, legitimasi, dan penciptaan nilai jangka panjang. Tingkat ketekunan komite audit dapat tercermin melalui frekuensi rapat yang dilakukan selama periode tertentu (Al-Nohood dkk., 2024). Semakin sering komite audit mengadakan rapat, maka semakin besar peluang bagi anggota komite audit untuk membahas sistem pengendalian internal, laporan audit, serta pengungkapan informasi non finansial perusahaan secara lebih mendalam. Arif dkk. (2020) menemukan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas dan kuantitas pengungkapan ESG, terutama pada perusahaan di sektor sensitif lingkungan di Australia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komite audit yang aktif mampu mendorong perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelaporan keberlanjutan dan memperluas pengungkapan ESG kepada para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, semakin tinggi frekuensi rapat komite audit, maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan keberlanjutan perusahaan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Buallay & Al-Ajmi (2018) juga menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan *sustainability reporting* pada bank-bank di negara Gulf Cooperation Council (GCC). Semakin sering komite audit melakukan pertemuan, maka semakin tinggi tingkat kesadaran, pengalaman, dan efektivitas pengawasan anggota komite audit terhadap pelaporan non-keuangan perusahaan. Selain itu, rapat yang lebih intensif memungkinkan komite audit untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam menyampaikan informasi ESG kepada para pemangku kepentingan. Temuan tersebut sejalan dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan perlu memenuhi

kebutuhan informasi para pemangku kepentingan melalui pengungkapan keberlanjutan yang lebih luas dan berkualitas. Dengan demikian, semakin tinggi frekuensi rapat komite audit, maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan keberlanjutan perusahaan. Berdasarkan landasan teoritis dan dukungan empiris tersebut, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H4 = Frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan.